

**PEMANFAATAN ASET DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDESA) “MUTIARA WELIRANG”
DESA KETAPANRAME UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DESA KETAPANRAME**

Zainul Arifin (124124027)

Fakultas Hukum/Magister Ilmu Hukum

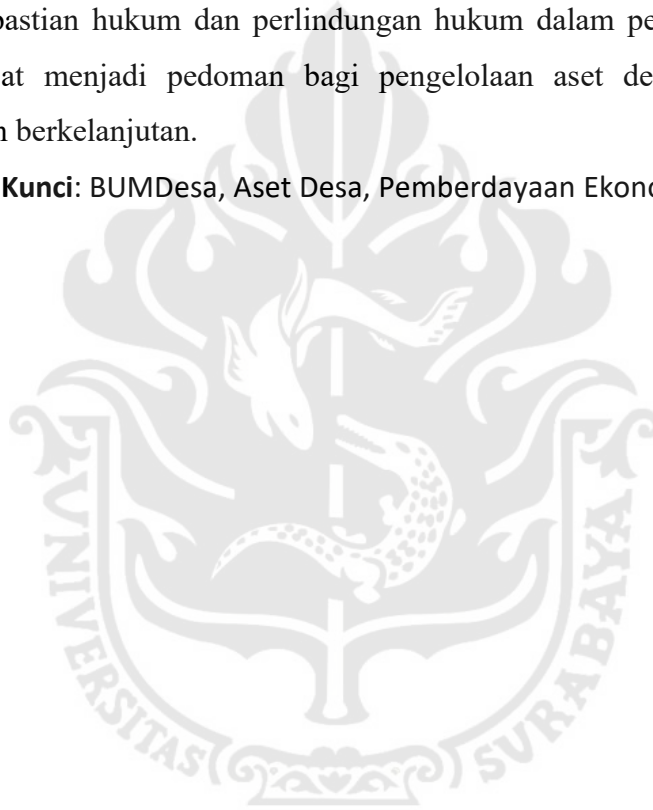
Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pemanfaatan aset desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan sejauh mana pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terwujud melalui pengelolaan aset desa. Desa memiliki potensi sumber daya yang besar, namun seringkali belum dioptimalkan. BUMDesa hadir sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa yang berperan mengelola aset desa secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan aset desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran BUMDesa “Mutiara Welirang” dalam memanfaatkan aset desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi di Desa Ketapanrame. Untuk memperkuat analisis, penelitian

ini juga menggunakan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam praktik hukum, serta teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dengan menganalisis ketentuan hukum dan praktik di lapangan melalui pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan aset desa sehingga dapat menjadi pedoman bagi pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDesa, Aset Desa, Pemberdayaan Ekonomi.



**UTILIZATION OF VILLAGE ASSETS BY VILLAGE-OWNED ENTERPRISES
(BUMDESA) “MUTIARA WELIRANG” OF KETAPANRAME VILLAGE FOR
THE ECONOMIC EMPOWERMENT OF KETAPANRAME VILLAGE
COMMUNITY**

Zainul Arifin (124124027)

Faculty of Law/Master of Law

Dr. Hwian Christianito, S.H., M.H.

Abstract

This research aims to analyze the regulations governing the utilization of village assets by Village-Owned Enterprises (BUMDesa) and the extent to which community economic empowerment can be realized through the management of these assets. Villages possess significant resource potential, yet this potential is often underutilized. BUMDesa serves as a legal entity established by the village, which plays a role in managing village assets professionally to improve community welfare. This study employs a normative juridical method with a statutory approach, examining various laws and regulations that form the legal basis for the management of village assets. These include Law Number 6 of 2014 concerning Villages as amended by Law Number 3 of 2024 concerning Amendments to Law Number 6 of 2014, Government Regulation Number 11 of 2021 concerning BUMDesa, and Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2016 concerning Village Asset Management as amended by Minister of Home Affairs Regulation Number 3 of 2024. In addition, this research also examines the role of the BUMDesa “Mutiara Welirang” in utilizing village assets to enhance economic empowerment in Ketapanrame Village. To strengthen the analysis, the study adopts the legal certainty theory by Gustav Radbruch, which emphasizes the importance of justice, utility, and legal certainty in legal practice, as well as the legal protection theory by Philipus M.

Hadjon, which focuses on the protection of citizens' rights from arbitrary actions by authorities. By analyzing legal provisions and field practices through these approaches, this research is expected to provide insights into the legal certainty and legal protection involved in the utilization of village assets, thereby serving as a guideline for transparent, accountable, and sustainable village asset management.

Keywords: BUMDesa, Village Assets, Economic Empowerment.

